

EVALUASI PENGENDALIAN INFLASI DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018

Vivi Monica Sari¹, Bambang Utoyo², Novita Tresiana³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
vivimonica24@gmail.com

Abstrak

Inflasi merupakan salah satu permasalahan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengendalikan inflasi yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk membentuk Tim Pengendalian Inflasi di tingkat pusat dan daerah, melalui tim tersebut dilaksanakan program kegiatan guna mengendalikan inflasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Bandar Lampung pada kelompok bahan pangan yang menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi yang tinggi di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan untuk teknik keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Penelitian ini menggunakan model evaluasi Karl Ludwig Bartelenfy yaitu model evaluasi masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam mengendalikan inflasi kelompok bahan pangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah melalui Satgas pangan melaksanakan berbagai program kegiatan antara lain pemantauan, pengawasan, pembinaan, sidak dan monitoring harga pasar, serta pasar murah. Dari program tersebut dapat dilihat bagaimana perkembangan harga pasar, meminimalisir peredaran produk tidak memenuhi standar, dan ketersediaan bahan pangan. Program kegiatan tersebut sudah memberikan hasil yang cukup baik hal ini dapat dilihat dari grafik *trendline* yang menunjukkan adanya penurunan pada kelompok bahan pangan, meskipun belum secara signifikan karena adanya kendala pada anggaran. Namun hal tersebut juga memberikan dampak yang baik disamping penurunan inflasi tetapi juga pada peningkatan kerja sama dengan mitra baru yang diharapkan dapat membantu mempermudah dalam upaya pengendalian inflasi di masa depan.

Kata Kunci : Evaluasi, Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan

Abstract

Inflation is one of the economic problems of a country including Indonesia. One of the efforts of the Indonesian government to control inflation is by coordinating with Bank Indonesia to establish an Inflation Control Team at the central and regional levels, through which the program is implemented to control inflation. The purpose of this research is to evaluate inflation control conducted by the Bandar Lampung City Government through the Bandar Lampung Regional Inflation Control Team in the foodstuffs group which is one of the contributing factors to high inflation in 2018. This research uses descriptive research method with qualitative approach, and uses data collection technique by interview, observation and documentation. Data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while for data validity techniques using observation and triangulation extension techniques. This research uses Karl Ludwig Bartelenfy's evaluation model of input, process, output, results, and impact evaluation. The results of this study concluded that in controlling the inflation of foodstuff groups the Regional Inflation Control Team through the food task force carried out various programs of activities, among others, monitoring, coaching, market inspection and monitoring market prices, as well as market operation or cheap markets. From the activities program can be seen how the development of market prices, minimizing the circulation of products that do not meet the standards, and the availability of foodstuff. Program of activities have given quite good results, this can be seen from the trendline chart that shows a decrease in the foodstuff. Although it has not been significantly due to constraints on the budget, it also has a good impact in addition to the decrease in the inflation index but also on increasing cooperation with new partners that is expected to help and facilitate efforts to control inflation in the future.

Keywords: Evaluation, Inflation, Regional Inflation Controlling Team (TPID), Food Task Force

I. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai lembaga negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan pembangunan perekonomian. Menurut Keban dalam Pemuka (2014:13) menjelaskan bahwa dalam administrasi publik pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa, aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, dimana hal tersebut menurut mereka benar dan baik bagi masyarakat. Termasuk juga peran dalam penyelenggaraan pembangunan perekonomian negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negaranya.

Pembangunan di sektor ekonomi di suatu negara perlu dilakukan, karena selain untuk kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara serta. Namun dalam pembangunan perekonomian tidak jarang menemukan berbagai macam persoalan dan hambatan salah satunya yaitu inflasi yang sering terjadi baik di negara berkembang maupun negara maju sekalipun tidak terlepas dari inflasi.

Pemuka (2014:18) menjelaskan bahwa dalam perekonomian suatu negara pemerintah berperan dalam membuat sebuah kebijakan baik itu bersifat mengatur, memperbaiki, serta mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun swasta, sehingga kemajuan dalam pembangunan suatu negara bergantung pada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk juga dalam hal perekonomian. Karena pencapaian dari suatu pembangunan tersebut sangat bergantung pada kebijakan dan program yang ditetapkan. Pada dasarnya suatu kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam melakukan perubahan yang ada atau mempengaruhi arah dan ketepatan dari suatu perubahan atau pembangunan yang sedang terjadi dimasyarakat.

Boediono dalam Masruroh (2019:12) menjelaskan bahwa inflasi merupakan suatu kecenderungan kenaikan harga – harga yang

terjadi secara terus menerus, dimana inflasi menjadi suatu masalah yang besar dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Menurut Bank Indonesia inflasi merupakan suatu kenaikan harga yang berada dalam jangka waktu tertentu dan terjadi secara terus menerus. Suatu kenaikan dapat dikatakan sebagai inflasi apabila kenaikan tersebut berdampak langsung dan meluas terhadap kenaikan harga lainnya.

Inflasi yang terjadi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor kejutan (*shock*), faktor ini memiliki dampak yang sangat besar yang berakibat pada gangguan produksi maupun distribusi. Bentuk faktor kejutan tersebut antara lain adalah bencana alam yang akan sangat berpengaruh terhadap komoditi pangan (*volatile food*) yang menghambat sistem produksi dan distribusinya. Kemudian faktor kejutan lainnya adalah kenaikan Bahan Bakar Minyak, yang mana akibat dari kenaikan bahan bakar tersebut akan memiliki dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat, faktor ini juga berdampak besar terhadap komoditi yang harganya dikendalikan oleh pemerintah (*administrated price*). Hal ini tentu akan mengurangi daya beli masyarakat dan tentunya akan ikut berimbas juga pada perekonomian di Indonesia (Dharma:2015).

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi adalah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data sampel perbandingan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2016, Kota Bandar Lampung berada di posisi ke delapan dari 82 wilayah yang menjadi sampel dengan inflasi aktual per Oktober 2016 sebesar 0,58%. Januari 2018 Kota Bandar Lampung menempati peringkat pertama dengan inflasi tertinggi diantara 82 kota lainnya yang menjadi sampel inflasi indeks harga konsumen sebesar 1,42%, dan bahan makanan menjadi kelompok penyumbang tertinggi sebesar 0,64%.

Untuk itu dalam menjaga stabilitas inflasi pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berdasarkan Instruksi Dalam Negeri (Inmendagri) No. 027/1696/SJ tanggal 02 April 2013 tentang “Menjaga Keterjangkauan

Barang dan Jasa di Daerah.”, dengan mengeluarkan SK Walikota Bandar Lampung No 806/III.24/HK/2013 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dalam menjaga stabilitas inflasi terutama pada stabilitas bahan pangan yang merupakan kelompok penyumbang inflasi tertinggi di Kota Bandar Lampung Tahun 2018. Untuk itu peneliti hendak melakukan evaluasi terhadap kebijakan atau program Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam menjaga stabilitas dan mengendalikan inflasi terutama pada pengendalian kelompok bahan pangan, mengingat kelompok pangan merupakan kelompok penyumbang inflasi tertinggi di Kota Bandar Lampung tahun 2018.

II. TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan Tentang Evaluasi

Konsep Evaluasi

Evaluasi mengandung dua aspek yang saling berkaitan dalam Parson (2014:546) yaitu, evaluasi kebijakan dan kandungan programnya, dan evaluasi terhadap orang – orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan program. Parson (2014:555) juga menjelaskan bahwa evaluasi dalam kebijakan publik juga melibatkan kontrol melalui penilaian, apresiasi, pengukuran kinerja atau monitoring terhadap orang – orang yang bekerja disektor publik baik tingkat lapangan maupun manajerial atau kebijakan. Sedangkan menurut Dye dalam Tresiana (2017:159) menjelaskan bahwa evaluasi dalam konteks kerangka dominan dalam evaluasi yaitu sebagai bentuk analisis rasional dan sebagai alat untuk manajemen sumber daya manusia. Dalam analisis rasional merupakan suatu kegiatan penilaian, pemeriksaan, kontrol, pemberian imbalan terhadap keluaran (*output*) kebijakan dan hasil (*outcome*) dari kebijakan tersebut.

Tujuan Evaluasi

Evaluasi dalam pelaksanaannya memiliki berbagai macam tujuan yang disesuaikan dengan objek evaluasinya. Berikut tujuan dilakukannya evaluasi menurut Wirawan (2012:22):

- a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat,
- b. Menilai dan mengukur program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.
- c. Mengidentifikasi dan menemukan dimensi program yang berjalan dan yang tidak berjalan.
- d. Pengembangan staf program, dimana dengan evaluasi maka dapat memberikan masukan kepada manajer program mengenai kinerja staf dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- e. Memenuhi ketentuan undang-undang, yang mana sebuah program dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan undang – undang guna menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat
- f. Akreditasi program,
- g. Mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*,
- h. Pengambilan keputusan mengenai program atau kebijakan,
- i. Akuntabilitas, evaluasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan terhadap program yang berjalan apakah sesuai rencana dan standar pelaksanaannya, dan berhasil atau tidaknya program tersebut.
- j. Memberikan balikan kepada pemimpin dan staff program, menurut Posavac dan Carey dalam Wirawan (2011:24) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan *loop* balikan untu layanan program sosial. *Loop* merupakan sebuah proses mengukur pelaksanaan program guna memnuhi kebutuhan, mengevaluasi pencapaian tujuan program, melakukan perbandingan antara pengaruh keluaran program dengan biaya serta dampak atau pengaruh yang diciptakan terhadap masyarakat.

Kriteria Dalam Evaluasi

Kriteria dalam evaluasi sebuah kebijakan atau program menurut Dunn dalam Tresiana (2017:101) antara lain sebagai berikut:

a. Efektivitas (*Effectiveness*)

Kriteria ini berkaitan dengan hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan rasionalitas teknis yang diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

b. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi dalam hal ini berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan guna mencapai hasil yang diinginkan. Kriteria ini merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang merupakan keterkaitan antara efektivitas dan usaha yang pada umumnya diukur berdasarkan ongkos moneter dan ditentukan melalui perhitungan biaya per unit suatu produk atau layanan.

c. Kecukupan (*Adequacy*)

Kriteria kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil atau efektivitas yang dihasilkan dapat memecahkan masalah, memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria ini lebih ditekankan pada kekuatan hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diinginkan.

d. Kesamaan (*Equity*)

Kriteria ini memiliki keterkaitan yang erat dengan rasionalitas legal, sosial dan merujuk pada distribusi akibat dari usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang memiliki orientasi terhadap pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, nit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan. Berbagai macam kebijakan pada umumnya didasarkan pada kriteria kesamaan antara

lain kebijakan yang dirancang guna mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik.

e. Responsivitas,

Kriteria ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok – kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini penting karena beberapa kriteria sebelumnya dapat dikatakan gagal apabila belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

f. Kelayakan,

Kriteria ini bersifat terbuka, diaman kriteria ini dimaksudkan untuk menjangkau diluar kriteria yang sudah ada. Untuk itu cara yang dapat dilakukan guna mencari definisi baku tentang kriteria ini antara lain dengan (1) mencari keadilan dan efisiensi, (2) keadilan dan keharusan, efisiensi, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan, (4) keadilan dan debat etika.

g. Ketepatan

Kriteria ini berkaitan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan seputar ketepatan suatu kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama – sama. Kriteria ini merujuk pada nilai atau harga dari suatu tujuan program dan pada kekuatan asumsi yang mendasari tujuan – tujuan tersebut.

Kriteria Dalam Evaluasi

Pada penelitian ini peneliti hendak menggunakan model evaluasi sistem analisis (*Analysis Evaluation Model*) yang dikemukakan oleh Karl Ludwig Von Bertalanffy dalam Wirawan (2012:107) yaitu sebagai berikut:

a. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Kelompok ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik. Dalam Mahmudi (2015:98), menjelaskan bahwa kelompok *input* dibagi menjadi dua yaitu, *Input* primer berupa kas dan *input* sekunder yang berupa segala jenis sumber daya yang

digunakan guna menghasilkan output yang dapat berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan infrastruktur.

b. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi proses berfokus pada pelaksanaan program dan sering menyediakan informasi mengenai kemungkinan program diperbaiki. Dalam indikator proses ukuran efisiensi dan ekonomis merupakan hal yang banyak mendapat perhatian, dimana ukuran efisiensi merujuk pada hasil yang diperoleh berdasarkan jumlah *input* atau masukan yang digunakan, dan ukuran ekonomis merujuk pada biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan lebih murah dari biaya yang standar biaya yang telah dianggarkan serta ketepatan waktu yang telah ditentukan guna kelangsungan kegiatan tersebut.

c. Evaluasi Keluaran (*Output Evaluation*)

Kelompok luaran adalah hasil langsung yang diperoleh dari suatu proses atau hasil implementasi sebuah program atau aktivitas yang dapat berupa *tangible* (terwujud) atau *intangible* (tidak terwujud).

d. Evaluasi Hasil (*Outcome Evaluation*)

Kelompok hasil mengukur apa yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan, dimana kelompok ini mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan dalam jangka menengah dan memiliki efek langsung. Dengan kata lain hasil merupakan ketercapaian suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan.

e. Evaluasi Dampak (*Impact Evaluation*)

Evaluasi ini menilai perubahan yang terjadi sebagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh suatu program. Evaluasi ini mengukur pengaruh program sebagai hasil program dalam jangka panjang

Menurut Bank Indonesia inflasi merupakan suatu kenaikan harga yang berada dalam jangka waktu tertentu dan terjadi secara terus menerus. Suatu kenaikan dapat dikatakan sebagai inflasi apabila kenaikan tersebut berdampak langsung dan meluas terhadap kenaikan harga lainnya. Menurut Santoso (2017) menjelaskan bahwa inflasi mencakup aspek – aspek sebagai berikut:

- Tendency*, yaitu kecenderungan harga – harga mengalami kenaikan meskipun dalam waktu tertentu terjadi penurunan namun secara keseluruhan tetap cenderung mengalami kenaikan
- Sustained*, kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang panjang
- General level of price*, harga barang yang dimaksudkan dalam inflasi tidak hanya satu atau dua barang saja tetapi mencakup harga barang secara umum.

Teori Tentang Inflasi

Menurut Bank Indonesia (www.bi.go.id) secara umum terdapat tiga teori mengenai inflasi antara lain sebagai berikut :

Teori Kuantitas

Teori ini dikenal juga dengan teori yang berkaitan dengan uang, yang pada dasarnya merupakan sebuah hipotesis mengenai faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar menjadi faktor penentu yang memberikan pengaruh terhadap kenaikan tingkat harga. Namun teori ini tidak hanya menekankan pada faktor uang yang menjadi penyebab perubahan tingkat harga tetapi juga berkaitan dengan hal – hal antara lain (1) proporsionalitas jumlah uang dengan tingkat harga, (2) mekanisme transmisi moneter, (3) netralitas uang, dan (4) teori moneter tentang tingkat harga.

Teori Keynes

Menurut Keynesian menjelaskan bahwa teori kuantitas tidak valid hal tersebut disebabkan karena teori ini berasumsi bahwa ekonomi dalam kondisi *full employment* (kapasitas ekonomi penuh), dimana dalam kondisi ini pertambahan (ekspansi) yang beredar justru akan menambah *output*

Tinjauan Tentang Inflasi

Pengertian Inflasi

(meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja) dan tidak akan meningkatkan harga, disisi lain bertambahnya jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh tetap terhadap variabel rill seperti *output* dan suku bunga.

Teori Strukturalis

Teori menjelaskan bahwa terdapat dua masalah dalam perekonomian di negara berkembang yang mengakibatkan terjadinya inflasi. *Pertama*, dalam hal penerimaan ekspor yang tidak elastis, dimana pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan lainnya. *Kedua*, tidak elastisitasnya sistem produksi bahan dalam negeri dimana pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak lebih cepat dari pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita..

Jenis Inflasi Berdasarkan Sumber atau Penyebabnya

Jenis inflasi berdasarkan sumber atau penyebabnya menurut Bsnk Indonesia antara lain sebagai berikut:

Inflasi Permintaan

Inflasi permintaan merupakan inflasi yang timbul akibat dari interaksi yang terjadi antara penawaran domestik dalam jangka panjang. Tekanan inflasi akan muncul apabila ada perbedanan antara permintan dengan penawaran agregat atau potensi *output* yang ada.

Inflasi Penawaran

Inflasi ini diakibatkan karena adanya faktor penawaran lain yang memicu kenaikan harga penawaran atau suatu barang, baik barang impor maupun barang yang harganya dikendalikan oleh pemerintah. Disamping itu inflasi juga dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor yang muncul akibat dari kebijakan tertentu

Inflasi Ekspektasi

Faktor ini sangat berperan dalam pembentukan harga dan juga upah tenaga

kerja. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat dari inflasi ini diperlukan peningkatan kredibilitas kebijakan dari bank sentral. Dimana bank sentral yang memiliki kredibilitas tentu dapat menurunkan ekspektasi inflasi serta dapat mendorong ekspektasi inflasi yang berdasarkan pada kondisi ekonomi ke depan (*forward looking*).

Jenis Inflasi Berdasarkan Sifatnya

Menurut Nopirin dalam Yuliandari (2014:17), inflasi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

a. Inflasi Menyerap (*creeping inflastion*), inflasi ini ditandai dengan laju pertumbuhan inflasi yang rendah kurang dari 10% setiap tahunnya.

b. Inflasi Menengah (*galloping inflation*), inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya *double* digit atau bahkan *triple* digit) dan cenderung berjalan pada waktu yang relatif pendek serta memiliki sifat yang akselerasi.

c. Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*), inflasi ini memiliki dampak yang lebih parah dari kedua jenis sebelumnya, imana harga bisa naik hingga 5 hingga 6 kali. Inflasi ini biasanya timbul karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja, dimana belanja atau ditutup dengan cara mencetak uang.

Efek Inflasi

Berikut efek inflasi menurut Nopirin dalam Maryati (2010:13-15) :

a. Efek Terhadap Pendapatan (*Equity Effect*),

Efek yang terjadi terhadap pendapatan ini sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada pula yang diuntungkan dengan terjadinya inflasi

b. Efek Terhadap Efisiensi (*Efficiency Effect*)

Dengan adanya inflasi permintaan terhadap barang tertentu akan mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain yang kemudian akan mendorong kenaikan produksi barang tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola alokasi faktor produksi

yang sudah ada dan akan menjadi tidak efektif.

c. Efek Terhadap Output (*Output Effects*)

Keadaan inflasi yang tinggi, disertai penurunan nilai uang riil yang drastis akan berdampak pada masyarakat yang akan mulai tidak menyukai uang *cash* dan akan lebih cenderung pada sistem transaksi barter yang akan diikuti oleh turunnya produksi barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dengan *output*, inflasi yang terjadi dapat diikuti oleh kenaikan *output*, akan tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan *output*.

Cara Mencegah Inflasi

Menurut Bank Indonesia secara umum bentuk pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan melalui beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut:

a. Kebijakan Moneter

Sasaran dari kebijakan ini dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar yang salah satu komponennya adalah uang giral (*demand deposit*) yang dapat dilakukan dengan dua cara memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro, dan pinjaman yang diperoleh dari bank diterima dalam bentuk giro. Disamping itu cara lain yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan tingkat diskonto (*diskonto rate*) yang merupakan tingkat diskonto untuk pinjaman yang diberikan kepada bank sentral kepada bank umum. Pinjaman ini berupa tambahan cadangan bank umum yang ada pada bank sentral.

b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan ini menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang memiliki pengaruh secara langsung pada permintaan total sehingga dapat mempengaruhi harga sehingga laju pertumbuhan inflasi dapat ditekan.

c. Kebijakan yang Berkaitan Dengan Output

Kebijakan ini dapat dicapai dengan cara menambah jumlah barang yang ada didalam negeri baik dengan produksi

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian pada model evaluasi Karl Ludwig Bartelenfy yaitu *Analysis Evaluation Model* dalam Wirawan (2011:107) antara lain yaitu, Evaluasi Masukan (*Input*), Evaluasi Proses (*Process*), Evaluasi Keluaran (*Output*), Evaluasi Hasil (*Outcome*), dan Evaluasi Dampak (*Impact*). penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan baik melalui wawancara serta observasi dan data sekunder yang diperoleh dari buku, arsip, dan catatan atau dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan untuk teknik keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Penelitian ini menggunakan model evaluasi yaitu model evaluasi masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini tahapan selanjutnya yaitu pembahasan yang akan peneliti deskripsikan berdasarkan pada fokus penelitian dan juga pada sub bab hasil penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan pembahasan dari penelitian yaitu mengenai “Evaluasi Pengendalian Inflasi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018” dengan menggunakan model evaluasi Karl Ludwig Von Bertalanfy dalam Wirawan (2011: 107) yaitu sebagai berikut:

Evaluasi Masukan (*Input*)

Salah satu prasyarat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menjaga agar inflasi tetap berada di level rendah dan stabil. Disamping karakteristik sumber inflasi yang tidak hanya berasal dari segi permintaan yang biasanya dikelola oleh

Bank Indonesia tetapi juga berasal dari segi penawaran yang mana berkaitan dengan faktor distribusi, gangguan produksi, maupun dari kebijakan pemerintah. Sehingga apabila dilihat dari karakteristik inflasi tersebut dalam rangka pengendalian inflasi memerlukan kerjasama lintas sektor atau instansi. Dalam hal ini bentuk kerjasama tersebut direalisasikan dengan adanya koordinasi antara Pemerintah dengan Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi pada tingkat pusat pada tahun 2005 yang kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim yang sama untuk tingkat Daerah pada tahun 2008 berdasarkan Imendagri No. 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013.

Di Kota Bandar Lampung sendiri pembentukan tim ini sudah dilakukan sejak tahun 2013 berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.806/III.24/HK/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandar Lampung, yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung No.383/IV.01/HK/2017 Tanggal 18 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandar Lampung Tahun 2017. Secara umum TPID berperan dalam mencapai stabilisasi inflasi di Kota Bandar Lampung dengan melakukan pemantauan dan inventarisasi, mengevaluasi sumber – sumber dan potensi tekanan inflasi, serta memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pengendalian inflasi daerah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sumberdaya yang digunakan dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah tersebut terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang memiliki tugas dan fungsinya masing – masing dalam mengendalikan inflasi begitu juga dalam pengendalian di sektor pangan yang menjaga stabilitas harga, keterjangkauan dan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Satgas Pangan TPID Kota Bandar Lampung. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab latar belakang sebelumnya juga disebutkan bahwa pada tahun 2018 kelompok yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi adalah

kelompok makanan terutama pada Januari 2018 sebesar 0,64% tertinggi dari kelompok lainnya. Dalam data perkembangan inflasi Kota Bandar Lampung Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa presentase perubahan Indeks Harga Konsumen Januari 2018 terhadap Desember 2017 sebesar 2,68 dan presentase perubahan bulan Januari 2018 terhadap bulan Januari 2017 sebesar 3,54 sehingga awal tahun 2018 dibuka dengan inflasi yang cukup tinggi.

Berdasarkan hal tersebut TPID Kota Bandar Lampung dalam rangka mengendalikan inflasi pada kelompok pangan dalam hal ini melalui Satgas Pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang juga berkoordinasi dengan instansi yang terkait lainnya dengan berupaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan dengan melakukan serangkaian kegiatan antara lain seperti kegiatan operasi pasar, pemantauan, dan pembinaan.

Kemudian dari segi anggaran seperti yang telah dijelaskan dalam Buku Petunjuk TPID tahun 2014 dijelaskan bahwa sumber pembiayaan dalam pelaksanaan tugas TPID dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), namun diharapkan juga dapat didukung oleh masing – masing setiap anggota TPID yaitu Pemerintah Daerah itu sendiri, lembaga terkait dan Bank Indonesia. Sementara itu pembiayaan bagi anggota yang berasal dari Bank Indonesia akan dibebankan kepada anggaran dari Bank Indonesia itu sendiri. Kemudian pembiayaan yang berhubungan dengan melaksanakan rekomendasi kegiatan TPID sepenuhnya menjadi beban instansi pelaksana yang diambil dari APBD begitu juga yang dilakukan oleh TPID Kota Bandar Lampung yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh APBD.

Evaluasi Proses (*Process*)

Setiap program kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Satgas Pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung yang berkoordinasi dengan instansi – instansi terkait sebagai upaya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kota Bandar Lampung dengan program kegiatan yang berfokus pada Pengawasan Terhadap Gejolak Harga Pangan, Distribusi Pangan dan Keamanan Pangan Kota Bandar Lampung

tersebut antara lain yaitu, kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di Toko Tani Indonesia selaku mitra dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan sebagai upaya nyata dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pangan dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau.

Selain itu yang menjadi kegiatan utama pengendalian inflasi di Kota Bandar Lampung sejak tahun 2011 adalah menjamin ketersediaan dan stabilitas bahan pangan beras, dimana konsumsi beras untuk Kota Bandar Lampung sendiri tahu 2018 sebesar 189.900 ton/tahun. Selain mendatangkan beras dari luar wilayah Kota Bandar Lampung juga dilakukan pengoptimalan kembali dan revitalisasi unit penggilingan padi atau RMU (*Rice Milling Unit*) yang terdiri dari 16 unit yang tersebar di 6 kecamatan yaitu Rajabasa, Sukabumi, Tanjung Senang, Sukarame, Teluk Betung Barat, dan Kemiling. Selain itu juga memiliki 4 lumbung pangan masyarakat yang merupakan tempat penampungan hasil panen masyarakat tani di Kecamatan Tanjung Senang 3 buah dan Kecamatan Rajabasa 1 buah. Dari 6 penggilingan padi yang menjadi *sample* di Kota Bandar Lampung hanya menghasilkan $\pm$ 100.000 ton/tahun. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung keberlangsungan RMU adalah dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana seperti gudang, dan mesin, kemudian diberikan juga bantuan permodalan, dan memfasilitasi dengan pelatihan pemasaran dan peningkatan SDM serta mutu hasil.

Kemudian selanjutnya juga dilakukan kegiatan lain berupa pengawasan dan pembinaan di pasar – pasar tradisional dan RPA (Rumah Potong Ayam) dan RPH (Rumah Potong Hewan) yang ada di Bandar Lampung, dalam kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan stok pangan antar pedagang hal ini dikarenakan sedang persiapan menjelang Idul Fitri dengan harga beberapa komoditi yang masih stabil. Kemudian dilakukan juga kegiatan sidak dan pengawasan ke beberapa pasar modern seperti *Giant Express*, *Hypermart*, dan *Transmart* serta dilakukan juga pembinaan agar selalu menjaga keamanan pangan hal ini

dikarenakan hasil dari kegiatan pemantauan tersebut ditemukan bahwa beberapa produk makanan sudah tidak layak konsumsi, dan tidak memenuhi ketentuan izin yang berlaku. Sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada ritel – ritel tersebut agar dapat mematuhi dan menjaga produk – produk mereka tetap bagus dan aman hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya kegiatan pengawasan dan pembinaan lain juga dilakukan terutama pada saat – saat menjelang ramadhan dan hari raya, kegiatan ini dilaksanakan di Gudang Sembako.

Kemudian kegiatan penetrasi pasar atau operasi pasar yang sering dilakukan saat menjelang hari – hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dimana pada saat – saat seperti ini harga – harga dipasaran dapat dipastikan akan mengalami kenaikan, barang – barang yang umumnya dijual saat operasi pasar adalah barang – barang kebutuhan pokok seperti, beras, minyak goreng, gula, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di 20 Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung yang juga melibatkan BUMN/BUMD, perusahaan retail dan UKM dengan menjual bahan – bahan pokok 30% lebih murah dari harga dipasaran. Sedangkan pada kegiatan operasi pasar bahan – bahan yang dijual disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

Evaluasi Keluaran (*Output*)

Berdasarkan proses pelaksanaan kegiatan seperti yang telah dijelaskan di atas hasil langsung yang didapat dari pelaksanaan program kegiatan tersebut antara lain pada kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan dalam hal stabilitas pangan, distribusi, dan keamanan pangan, serta program kegiatan sidak pasar dan monitoring harga pasar yang menghasilkan berbagai penemuan yang ada dilapangan seperti banyak dari produk – produk makanan yang belum memiliki izin edar resmi dari BPOM dan tidak memenuhi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang menjamin produk makanan tersebut dikeluarkan oleh produsen yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, masih banyak produk yang belum mencantumkan tanggal kemas dan

kadaluasrasa dan bahkan juga tidak layak konsumsi. Pada kegiatan sidak yang dilakukan di pasar modern yang ada di Kota Bandar Lampung juga ditemukan bahan makanan yaitu buah anggur yang mengandung formalin serta pada produk sayur sawi hijau yang mengandung pestisida. Kemudian kegiatan monitoring harga pasar ditemukan bahwa harga relatif stabil namun pada beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan seperti pada bawang merah, cabai merah, daging ayam dan telur, serta adanya peningkatan stok pangan terutama saat menjelang hari besar.

Pada program kegiatan pengawasan gudang juga ditemukan bahwa, masih banyak lokasi gudang yang tidak sesuai dengan Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2030 dan adanya ketidaksesuaian ukuran gudang antara dokumen perizinan yang ada dengan keadaan dilapangan. Kemudian berdasarkan berbagai hasil temuan diatas selanjutnya dilakukan pembinaan kepada para pegadangan, produsen, distributor gudang untuk melakukan perbaikan, melengkapi perizinan untuk mengedarkan produk dan memastikan keamanannya, dan produk – produk yang tidak memenuhi standar dan izin akan diamankan dan kemudian akan dilakukan pemusnahan. Kemudian melakukan sosialisasi mengenai Tata cara dan Kelengkapan Perizinan Pengelolaan Gudang di Kota Bandar Lampung dan sosialisasi Harga Eceran Tertinggi beras berdasarkan Permendag No.57 Tahun 2017 tentang Penetapan HET Beras yang berlaku sejak tanggal 1 September 2017.

Kemudian dari hasil pengembangan dari berbagai program kegiatan diatas sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan harga pasar, ketersediaan dan stabilitas bahan pokok yang tersedia dipasaran serta keamanan dari bahan pangan itu sendiri sehingga dari hasil kegiatan tersebut dapat di analisa adanya kemungkinan akan terjadinya peningkatan harga di pasaran terutama saat menjelang hari besar keagamaan, dan salah satu program kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi mengendalikan harga inflasi adalah Operasi Pasar atau pasar murah dimana harga sembako yang dijual

dalam kegiatan ini relatif sama dengan Harga Eceran Tertinggi yang berlaku namun pada beberapa keadaan tertentu bahan pokok dijual 30% lebih murah dari harga pasaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat

Meskipun hasil pelaksanaan program – program kegiatan seperti di atas sudah cukup baik, namun disini itu masih ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan mengingat bahwa memang komoditas pangan yang ada di Kota Bandar Lampung tidak stabil terutama pada komoditas bahan pokok seperti beras, bawang merah dan lain – lain karena masih membutuhkan pasokan impor dari luar wilayah Kota Bandar Lampung bahkan pula dari luar negeri. Hal tersebut disebabkan karena Kota Bandar Lampung belum mampu untuk memproduksi sendiri bahan – bahan tersebut mengingat lahan yang semakin menyempit akibat pembangunan yang semakin marak dilakukan. Disamping itu juga adanya kendala terhadap anggaran membuat pemerintah belum mampu untuk melakukan intervensi secara lebih jauh salah satunya mengendalikan harga sehingga apabila terjadi kenaikan bahan pokok salah satu usaha pemerintah Selain itu, keamanan dari produk – produk yang dijual di pasaran pun juga masih membutuhkan pengawasan, dimana hal ini dapat dilihat dari hasil sidak pemantauan yang dilakukan oleh satgas pangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masih banyak produk – produk yang beredar belum memenuhi standar kualitas baik itu dari segi izin edar maupun dari keamanan produk itu sendiri.

Kemudian yang terjadi pada stabilitas harga di pasaran pun juga masih memerlukan pemantauan yang lebih intensif mengingat harga yang cenderung bisa naik sewaktu – waktu terutama pada saat menjelang hari besar keagamaan, hal ini yang umumnya disebabkan oleh faktor distribusi dari produsen yang terhambat baik dari segi cuaca maupun sarana dan prasarana

Evaluasi Hasil (*Outcome*)

Pada evaluasi ini mengukur ketercapaian dari suatu program kegiatan yang telah

dilaksanakan. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh satgas pangan dalam rangka mengendalikan inflasi pada kelompok bahan pangan dengan menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan yang mana berbagai program kegiatan telah dilaksanakan guna mencapai tujuan tersebut, seperti melakukan sidak langsung ke lapangan, pemantauan, pembinaan, dan kegiatan operasi pasar. Melalui kegiatan diatas dapat diketahui bagaimana kondisi nyata dilapangan, bagaimana perkembangan harga pasar, dapat meminimalisir peredaran produk tanpa izin dan tidak memenuhi syarat, dapat terjaminnya ketersediaan pangan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, serta peningkatan daya beli masyarakat Kota Bandar Lampung.

Kemudian juga dilakukan pembinaan kepada para pedagang dan produsen agar tetap menjaga keamanan produk sebelum sampai ke tangan masyarakat agar menerima produk yang bagus, aman, dan sehat sehingga tidak merugikan masyarakat. Kemudian kegiatan operasi pasar yang bertujuan agar masyarakat dari kelas menengah kebawah dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka terutama saat menjelang hari besar keagamaan, karena pada saat seperti inilah banyak dimanfaatkan oleh pedagang untuk menaikkan harga agar keuntungan yang didapat pun juga lebih besar.

Apabila dilihat dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh TPID dapat dikatakan bahwa sudah menunjukkan perubahan yang cukup bagus meskipun belum secara signifikan, namun cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun baik itu sebelum dibentuknya tim ini maupun setelah tim ini dibentuk. Begitu pula yang terjadi pada kelompok bahan makanan yang juga cenderung mengalami penurunan selama tahun 2018 dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang justru cenderung mengalami peningkatan sampai akhir tahun. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran serta TPID melalui satgas pangan dan instansi terkait lainnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan diatas meskipun belum menunjukkan perubahan yang besar namun dari kegiatan tersebut sudah menunjukkan dampak hasil yang cukup baik

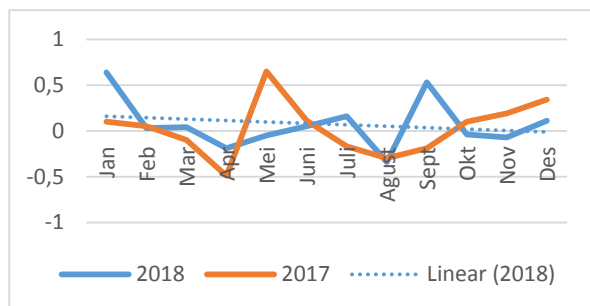
dan diharapkan dapat terus memberikan dampak yang baik untuk kedepannya, sehingga dapat menjaga inflasi tetap berada dilevel rendah dan stabil.

Evaluasi Dampak (*Impact*)

Pada evaluasi ini pengukuran lebih kepada perubahan yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya intervensi dari sebuah program kegiatan dan pengaruhnya pada program jangka panjang. Dalam hal ini segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TPID dalam rangkan menjaga inflasi pada kelompok bahan pangan melalui satgas pangan dengan menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan yang ada di Kota Bandar Lampung memiliki pengaruh yang cukup baik. Melalui berbagai macam kegiatan seperti sidak, pemantauan serta operasi pasar yang dilakukan guna bertujuan untuk mengatasi daya beli masyarakat. Meskipun hasil dari berbagai kegiatan diatas tidak terlalu menunjukan perubahan yang signifikan namun hal ini sudah menunjukan dampak yang baik, salah satunya seperti sudah berkurangnya produk – produk yang tidak sesuai ijin edar, adanya penurunan inflasi pada kelompok pangan per Januari hingga Desember tahun 2018, banyak terjalin kerjasama dengan mitra – mitra baru yang dapat mendukung keberlangsungan program kegiatan yang dilaksanakan baik itu untuk satgas pangan maupun bagi TPID itu sendiri.

Meskipun disisi lain untuk komoditas beras yang masih harus impor dari luar wilayah terutama saat musim kering dan harganya juga cenderung naik, namun sudah ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan revitalisasi tempat penggilingan padi dan pemanfaatan lumbung pangan yang ada di beberapa titik di Kota Bandar Lampung meskipun dampak yang dirasakan tidak cukup besar. Namun dengan adanya upaya tersebut juga membawa hal baik salah satunya dengan membuka kerjasama antar kelompok tani yang ada di Kota Bandar Lampung dengan beberapa pihak dalam hal pemasaran seperti BULOG dan Toko Tani Indonesia yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak baik bagi pengelolaan beras yang ada di Kota Bandar Lampung.

Selain itu dampak secara keseluruhannya juga dapat dilihat di *trendline* pada grafik perkembangan inflasi di Kota Bandar Lampung pada bab hasil penelitian bagian evaluasi dampak yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 begitu pun dengan sumbangan inflasi pada kelompok bahan makanan selama tahun 2018 pada *trendlinenya* yang juga menunjukkan penurunan. Hal ini merupakan salah satu bentuk intervensi dari berbagai program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TPID melalui satgas pangan dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung.



Gambar 1. Grafik Inflasi Kelompok Bahan Pangan 2017 - 2018

Adapun beberapa program kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka pendek antara lain dengan memanfaatkan kembali beberapa gudang dan lumbung pangan, membetuk cadangan beras pangan daerah maupun pengawasan stok, pengembangan desa mandiri pangan, melakukan pengawasan kelancaran dan keamanan distribusi barang dari daerah penghasil menuju lokasi pemasaran, perbaikan pengelolaan pasca panen, dan optimalisasi pelaksanaan operasi pasar dan mereview kecukupan pasokan di tingkat gudang, distributor dan pasar. Selain program kegiatan jangka pendek diatas terdapat pula program jangka panjang yang telah ditetapkan program tersebut antara lain, melakukan pemetaan surplus dan devisit komoditas pangan sebagai dasar melakukan perdagangan antar daerah, pengembangan dan pembinaan beras produksi lokal lampung (Beras Siger) serta

penganekaragaman makanan non beras dan non tepung, kerjasama pengembangan produk turunan komoditas (cabe merah dan bawang merah) dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan produk turunan seperti, bubuk cabai, pasta bawang dan lain – lain, optimalisasi fungsi Satgas Pangan pada saat panen di lokasi RMU dan arena panen, serta dalam menjaga kelancaran operasi pasar di titik pemasaran.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mengendalikan inflasi yang terjadi di Kota Bandar Lampung yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, terutama pengendalian pada kelompok bahan pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung dengan membentuk Satgas Pangan dan anggaran yang dibebankan pada APBD. Melalui satgas pangan tersebut dilaksanakan berbagai program kegiatan sebagai upaya dalam mengendalikan inflasi antara lain yaitu, pemantauan, pengawasan, pembinaan, sidak dan monitoring harga pasar, serta operasi pasar atau pasar murah. Sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi nyata di lapangan, baik itu mengenai perkembangan harga pasar, mengetahui apabila ada produk yang beredar tanpa kelengkapan izin, hingga ketersediaan bahan pangan di pasaran. Melalui pelaksanaan berbagai program kegiatan tersebut sudah memberikan hasil yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari grafik *trendline* yang menunjukkan adanya penurunan indeks inflasi kelompok bahan pangan yang semula pada Januari sebesar 0,64% menjadi 0,11% pada Desember 2018. Meskipun meskipun belum secara signifikan, hal ini disebabkan karena TPID belum mampu untuk mengintervensi pasar secara lebih jauh dikarenakan kendala pada anggaran, meskipun disisi lain masih terdapat kekurangan. namun hal tersebut sudah memberikan dampak yang cukup bagus disamping adanya penurunan indeks inflasi

tetapi juga peningkatan kerjasama dengan mitra – mitra baru sehingga diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam upaya pengendalian inflasi di masa depan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas, peneliti hendak menyampaikan saran terkait dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kedepannya yang diharapkan dapat membantu dalam pengendalian inflasi terhadap kelompok bahan pangan nantinya. Adapun saran tersebut antara lain yaitu:

1. Meningkatkan kerjasama TPID antar wilayah di Provinsi Lampung dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan, teruma pada wilayah – wilayah yang menjadi tempat pemasok kebutuhan pangan bagi Kota Bandar Lampung.
2. Perlu dilakukan reformasi atau perubahan pada struktur pasar agar menjadi lebih terbuka sehingga pasar dapat menjadi lebih kompetitif agar tidak didominasi oleh kelompok tertentu sehingga dapat lebih efisien.
3. Meningkatkan peran aktif dari Organisasi Perangkat Daerah dalam pengendalian inflasi yang berkaitan dengan kelompok bahan pangan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Bank Indonesia. (2014). Buku Petunjuk TPID. <https://www.bi.go.id/>.
- Dharma, S. (2014). *Analisis Peranan Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terhadap Pengendalian Inflasi di Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, Ekonomi Pembangunan. <https://repositori.usu.ac.id>.
- Indeks Harga Konsumen di 82 Kota di Indonesia. (2018). <http://www.bps.go.id/publication/20>

19/04/09/6081f1a9a9ee0aaf0df54e3c/indeks-harga-konsumen-di-82-kota-di-indonesia--2012-100--2018.html.

- Maryati. (2010). *Pengaruh Faktor - Faktor Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang, Ekonomi Pembangunan. Semarang: <http://lib.unnes.ac.id/2835/1/6424.pdf>.
- Masrurah, S. (2019). *Evaluasi Kinerja TPID Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Provinsi Kalimantan Utara*. Universitas Terbuka, Magister Administrasi Publik. Jakarta: repository.ut.ac.id.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Parson, W. (2011). *PUBLIC POLICY Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pemuka, A. R. (2014). *Analisis Pengaruh Program Pengentasan Kemiskinan Desa (PPKD) Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Di Desa/Pekon Adiluhik Kabupaten Pringsewu*. skripsi, Universitas Lampung, Ekonomi Pembangunan, Bandar Lampung.
- Santoso, A. B. (2017). Analisis Inflasi Daerah. <http://unisbank.ac.id>.
- Tresiana, N. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Tresiana, N. (2017). *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA.
- Wirawan. (2012). *EVALUASI Teori, Model, Standar, Aplikasi, Dan Profesi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Yuliandari, A. (2016). *Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Inflasi Di Asean*. Universitas Trisakti, Fakultas ekonomi. Jakarta Barat: <http://repository.trisakti.ac.id>.

